



PROGRAM KARTU PRAKERJA MANDEK

Pemkot Yogya Tunggu Kebijakan Pusat

UMBULHARJO (MERAPI) - Ribuan warga Kota Yogyakarta yang sudah mendaftar program Kartu Prakerja, tidak jelas nasibnya. Belum ada kepastian jumlah warga Kota Yogya yang lolos maupun menerima dana insentif karena program Prakerja dari pemerintah pusat itu, mandek. "Sekarang kami masih menunggu kebijakan dari pusat seperti apa. Kami belum tahu apakah itu akan terus menjadi pola atau ada evaluasi terus jalan lagi," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kamis (25/6).

Menurut Heroe, terdapat ada 1.156 warga Kota Yogyakarta yang mendaftar Kartu Prakerja. Namun Pemkot Yogyakarta tidak memiliki data jumlah pendaftar yang lolos program Kartu Prakerja maupun mendapat dana insentif. Pasalnya pelaksanaan program Kartu Prakerja langsung antara pemerintah pusat dengan warga yang mendaftar secara online.

"Kami tidak tahu karena semua dari pusat. Seperti bansos dari pusat kami tidak bisa menentukan sasarannya karena anggaran dari pemerintah pusat. Makanya kami tidak bisa banyak terlibat," paparnya.

Ia menyatakan Pemkot Yogyakarta tidak bisa melakukan improvisasi kebijakan terkait program Kartu Prakerja karena harus ada dasar-dasar yang jelas. Pernyataan itu untuk menanggapi kemungkinan Pemkot Yogyakarta untuk mengusulkan adanya bantuan sosial ke pusat bagi pekerja terdampak yang sudah men-

daftar Kartu Prakerja, tapi belum menerima manfaat.

Menurutnya pemerintah pusat sudah menyiapkan dana dan skema program Kartu Prakerja. Tapi dia menilai banyak hal yang harus diperbaiki. Dia berpendapat program Kartu Prakerja memiliki masalah pada verifikasi peserta. Jika berbasis nomor induk kependudukan harus diverifikasi agar sasaran tepat. Jangan sampai semua memasukkan nomor induk kependudukan bisa masuk dan lolos, sedangkan orang yang berhak, tidak masuk.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setiawan mengatakan program Kartu Prakerja lebih baik dihentikan karena sedang ada pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program pemerintah pusat itu. Komisi D, lanjutnya, belum mendapatkan laporan terkait siapa warga Kota Yogya yang menerima bantuan dan detail bentuk bantuan program Kartu Prakerja itu. "Terkait Kartu Prakerja sudah tidak bisa diharapkan. Untuk selanjutnya program itu sebaiknya dialihkan menjadi bantuan sosial yang lebih konkret," imbuh Krisnadi.

Dia menyampaikan, Komisi D dalam rapat memutuskan mengusulkan adanya pemberian bantuan sosial dari Pemkot Yogyakarta bagi warga Kota Yogya yang kena PHK dan dirumahkan karena dampak wabah Covid-19. Tercatat ada 1.445 pekerja dirumahkan dan 62 orang kena PHK.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005